



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : WAHYU PRASETYO ADI
NIK : 3374042007750004
Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Unit Kerja : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Sub Unit Kerja : SEKRETARIAT
Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM
Jenis Laporan : Periodik - 2018
Tanggal Kirim : 31 Januari 2019

Catatan Hasil Verifikasi Administrasi:

Lengkap
 Tidak Lengkap



**) Lembar ini adalah bukti resmi penyampaian LHKPN setelah melalui proses verifikasi administrasi.*

Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
SUB UNIT KERJA : SEKRETARIAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WAHYU PRASETYO ADI
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM
3. NHK : 416968

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 410.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 86 m2/60 m2 di KOTA SEMARANG ,
HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/30 m2 di SEMARANG, HASIL
SENDIRI Rp. 110.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 132.500.000

1. MOTOR, SUZUKI BEBEK Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp.
2.500.000
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA 1,3G Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
130.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 9.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 132.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 683.500.000

III. HUTANG Rp. 246.558.983**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 436.941.017

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **5 Maret 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.